

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN**

**(Studi pada kegiatan kelompok wanita tani di Pekon Rantau Tijang
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

MAYA UTAMI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IIMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN

**(Studi pada kegiatan kelompok wanita tani di Pekon Rantau Tijing
Kec. Pugung Kab. Tanggamus)**

Oleh

MAYA UTAMI

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakatnya. Pemerintah mencanangkan program penganekaragaman konsumsi pangan sebagai upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan ketahanan pangan melalui kelompok wanita tani.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh analisa implementasi program penganekaragaman konsumsi pangan di Pekon Rantau Tijing serta untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam implementasi program penganekaragaman konsumsi pangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran kegiatan program belum semua terealisasi, yakni dari enam tujuan dan sasaran baru empat yang sudah terealisasi. Sumber- sumber dana insentif untuk tenaga Penyuluh kurang memadai sehingga penyuluh kurang profesional terutama dalam hal pengawasan. Adanya peningkatan perekonomian pada kelompok serta integrasi sosial dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam implementasi program penganekaragaman konsumsi pangan yaitu : kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan, selain itu kondisi akses jalan yang buruk menghambat pelaksanaan kegiatan program serta jumlah sumber daya manusia di lingkup Kantor ketahanan pangan kurang memadai.

Kata kunci : implementasi program, ketahanan pangan.

ABSTRACT

PROGRAM IMPLEMENTATION DIVERSIFICATION OF FOOD CONSUMPTION FOOD SECURITY IN THE MAKING

***(Studies On The Activities Of Women Farmers In Rantau Tijing District
Pugung)***

By

Maya Utami

Food is a basic need of human rights fulfillment into every people of Indonesia in achieving quality human resources. In this case the state has a duty to make sure the food needs of its people. Therefore, the program diversification of food consumption . as an effort to improve the quality of food consumption and food security through a group of women farmers.

This study aimed to analyze the implementation of the program diversification of food consumption in Rantau Pekon Tijing as well as to identify factors inhibiting or obstacles in the implementation of the program diversification of food consumption. This research use descriptive research with a qualitative approach with interviews, observation, and documentation.

The conclusion of this study is the goals and aims of the program activities have not all been realized, namely six goals and four new targets that have been realized. Sources of incentive funding for Extension inadequate power so that less professional educator, especially in terms of supervision. An increase in the economy and the integration of social groups in society. Obstacles met in the implementation of diversification of food consumption, namely: the lack of facilities and infrastructure are provided, in addition to the poor condition of the access roads hamper the implementation of the program of activities and the amount of human resources in the scope of the Office of inadequate food security.

Keywords: program implementation, food security.

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN**

**(Studi pada kegiatan kelompok wanita tani di Pekon Rantau Tijing
Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)**

Oleh

MAYA UTAMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IIMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

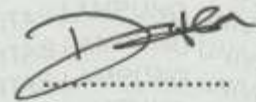
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dra. Dian Kagungan, M.H.



Sekretaris : Dewle Brima Atika, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Syarif Makhya, M.Si.
NIP 19560803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 April 2017

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN (Studi pada
Kegiatan Kelompok Wanita Tani di
Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung
Kab. Tanggamus)**


Nama Mahasiswa : **Maya Utami**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1016041017
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP 19690815 199703 2 001


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP 19821212 200801 2 017

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Maya Utami

NPM. 1016041017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Ciparai Rantau Tjang Kecamatan Pugung pada tanggal 31 Maret 1993, yang merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak A.Bukhorie.W., S.Pd.I dengan Ibu Susneli, S.Pd.

Penulis mengenyam pendidikan pertama di MI Al-Falah Ciparai tahun 1998-2004, SMP N 1 Pugung Tahun 2004 – 2007, dan SMA N 1 Pringsewu jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) tahun 2007 – 2010. Pada tahun 2010 Penulis diterima sebagai mahasiswi pada jurusan Ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB). Penulis mendapatkan Beasiswa Bidikmisi Dikti sejak tahun 2010 sampai tahun 2014.

Penulis pernah mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di desa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus tahun 2013. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 Penulis menikah dengan Sirli Adi Putra, S.Pd. dan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Hafizah Ainun Mahya yang lahir pada tanggal 14 Mei 2016.

MOTTO

Biasakan untuk menyimak (mendengarkan) nasehat-nasehat, sebab sesungguhnya hati ketika kosong dari nasehat maka akan buta.

(Syaiikh Abdul Qadir Al Jailani, Tokoh Ulama Fiqih)

Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur.

(Richard Wheeler,)

Jangan pernah membanting pintu, siapa tau kita harus kembali.

(Don Herold, Humoris dan Penulis Amerika)

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia (Nelson Mandela, Tkoh Revolusioner)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT.....

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Allah SWT, dengan mengucap syukur atas karunia yang telah dilimpahkan kepada Penulis.

Ayah dan Ibunda yang tiada hentinya selalu memberikan do'a, dukungan

Baik moril maupun materil. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kesabaran, serta motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan karya ini.

Suami tercinta yang selalu berusaha, berjuang, dan mendukung

Secara moril maupun materil.

Keluarga besar yang senantiasa selalu mengingatkanku untuk terus semangat

Dalam menyelesaikan karya ini.

Sahabat – sahabat, dan teman- temanku yang telah menjadi bagian dalam hidupku

Para Pendidik dan Almamater tercinta...

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunianya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas kehendak Allah SWT akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan (Studi pada kegiatan kelompok wanita tani di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku Dosen pembimbing Utama Penulis.
Terimakasih atas segala ilmu, saran, motivasi yang Ibu berikan selama proses bimbingan. Penulis selalu dan akan terus mengingat nasehat Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan Penulis yang pastinya tidak disengaja selama proses bimbingan.
2. Ibu Dewi Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku pembimbing kedua Penulis.
Terimakasih atas semua saran, ilmu, waktu, dan motivasi yang Ibu berikan

selama proses bimbingan. Mohon maaf Bu selama proses bimbingan Penulis melakukan kesalahan dan kekhilafan yang kurang berkenan di hati Ibu.

3. Bapak Simon Sumanjoyo, S.AN., M.P.A., selaku Dosen penguji. Penulis ucapkan terimakasih atas semua saran dan kritik membangun yang Bapak berikan sehingga menjadi sebuah pencerahan bagi Penulis.
4. Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Ketua jurusan Ilmu administrasi negara. Terimakasih atas motivasi yang Bapak berikan.
5. Bapak Eko Budi Sulistyio, Sos.,M.AP. selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terimakasih atas segala motivasi dan pesan-pesan moral yang bapak berikan.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah Bapak dan Ibu berikan selama proses perkuliahan. Semoga ilmu menjadi berkah dan menjadi ladang amal bagi kita semua.
7. Ibu Nur'aini, selaku Staff jurusan Ilmu administrasi negara. Terimakasih atas segala pelayanan administrasi yang baik selama Penulis menjadi Mahasiswi di jurusan Ilmu administrasi negara.
8. Para Staff Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus, Pak Suhartono, Pak Suryo, Pak Dian, Pak Rudi. Terima kasih atas izin dan informasi yang diberikan kepada Penulis.PPL Bu Iin, terimakasih atas informasi yang diberikan. Para Anggota kelompok wanita tani, terimakasih atas kerjasama yang baik dan informasi yang telah diberikan kepada Penulis.
9. Bapak Abukhorie.w., S.Pd.I dan Ibu Susneli, S.Pd., kedua orang tuaku tercinta, terimakasih atas semua dukungan moril dan materil, serta mendidik dan membesarkan Penulis selama ini.

10. Kakak- kakakku, Cahaya Adi Guna, A.Md. Surya Perdana, Sinarti Maya Sari, dan adik kesayangan Ade Ahmad Sampurna Jaya. Semoga kita semua sukses bisa membahagiakan orang tua.
11. Sirli Adi Putra, S.Pd., suami yang baik bagi Penulis. Terimakasih Yai, atas semua do'a, dukungan moril, materil dan keikhlasannya meluangkan waktu mengantar bolak – balik Kampus.
12. Nyaik Adah dan Datuk Ismail, terimakasih udah ngebabang Adek Ainun selama ditinggal ke kampus. Dan saudara-saudara iparku, Kyai Dian, Daying Dina, Batin Ria, Uncu Kiki, Pak Uda Ican. Terimakasih atas dukungannya.
13. Sahabat- sahabatku, terimakasih atas cerita suka duka yang sudah kita lewati, Putri, Rahma Mbul, Andria, Nurul, Cahya, Rana, Tasya. Semoga kita semua sukses, dapet kerjaan bagus, bisa kumpul lagi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.	8
D. Manfaat penelitian.	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.	10
1. Pengertian Kebijakan Publik.	10
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik.	11
B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.	15
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.	15
2. Syarat-syarat Pelaksanaan Kebijakan.	16
3. Model-model Implementasi Kebijakan.	18
4. Model implementasi Van meter dan Van Horn.	21
C. Tinjauan Tentang Ketahanan Pangan.	27
1. Sub Sistem Ketahanan Pangan.	31
2. Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.	37
B. Fokus Penelitian.	37
C. Lokasi Penelitian.	38
D. Jenis dan Sumber Data.	39
1. Data Primer.	39
2. Data Sekunder.	40
E. Teknik Pengumpulan Data.	40
1. Wawancara Mendalam (<i>indept interview</i>).	40

2. Observasi	40
3. Dokumentasi	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
1. Reduksi Data (Reduction Data).....	41
2. Penyajian Data (Data Display).....	41
3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing).....	42
G. Teknik Keabsahan Data.....	42
1. Derajat Kepercayaan (credibility).....	42
2. Keteralihan(Transferability).....	43
3. Kebergantungan.....	43
4. Kepastian.....	44

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanggamus.....	45
B. Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanggamus.....	46
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanggamus.....	47
D. Tujuan Kantor Ketahanan Pangan Kab. Tanggamus.....	47
E. Sejarah Pekon Rantau Tijang.....	49
F. Kondisi Umum Pekon.....	49

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL.....	52
1. Implementasi Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Pekon Rantau Tijang.....	52
2. Kendala- kendala dalam implementasi Program penganekaragaman konsumsi pangan.....	69
B. PEMBAHASAN.....	73
1. Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Pekon Rantau Tijang.....	73
2. Kendala- kendala dalam implementasi Program penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP).....	80

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 dokumen- dokumen data sekunder.	40
Tabel 4.1 keadaan sosial ekonomi penduduk Pekon Rantau Tjang.....	50
Tabel 5.1 Daftar hadir kelompok wanita tani.	68
Tabel 5.2 Tujuan dan Indikator keberhasilan program.	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Pembagian itik petelur.	55
Gambar 5.2 Pemanfaatan lahan pekarangan.	56
Gambar 5.3 Sosialisasi Program P2KP.	61
Gambar 5.4 Pengawasan oleh PPL.	63
Gambar 5.5 Kerjasama penanaman di kebun bibit.	65
Gambar 5.6 Pembuatan lahan kebun sekolah.	66
Gambar 5.9 Kondisi akses jalan menuju lokasi.	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak bisa terelakkan lagi, bahwa kebutuhan pangan memang menjadi kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi setiap manusia. Dalam hal ini, Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakatnya. Ketahanan pangan merupakan salah satu program nasional jangka menengah yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan maupun perekonomian di Indonesia.

Melalui berbagai kesepakatan internasional dan nasional, Indonesia telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2000, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICOSOC) yang diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Regional ASEAN pada Sidang

ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) pada bulan Oktober 2008. (*Renstra BKP tahun 2010-2014*)

Indonesia saat ini berada pada fase krisis pangan stadium empat atau sudah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan, karena Indonesia sudah terlalu banyak mengimpor berbagai produk pangan. Sebagaimana yang dinyatakan anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi pada acara Diskusi Publik Kartel Pangan dalam rangka memperingati Hari Tani di Jakarta, bahwa ada *grand design* untuk melemahkan pertanian Indonesia. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang sengaja membiarkan impor produk pangan sangat berlebihan.

(<http://m.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/09/25/mtnije-indonesia-masuk-krisis-pangan> diakses pada tanggal 23 Januari 2014)

Sebagai daerah agraris, lonjakan harga kedelai, minyak goreng, dan lain-lain, seharusnya tak perlu terjadi namun, kini Lampung mengimpor komoditas tersebut. Tidak hanya kedelai, sebagian besar hasil pertanian juga diimpor dari negara lain seperti beras, gula, daging ayam, daging sapi, bahkan garam. Data yang terungkap dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung menyebutkan bahwa produksi bahan pangan pokok tersebut tidak mampu menutupi kebutuhan masyarakat. Tahun ini, beras masih mengimpor sekitar 1 juta ton, impor gula setiap tahun sekitar 400-500 ribu ton, dan impor daging sekitar 450-500 ribu ekor sapi. Ada berbagai faktor yang menyebabkannya. Pertama, produktivitas tanaman pangan yang masih rendah dan terus menurun. Rata-rata produktivitas padi adalah 4,4 ton per/ha, jagung 3,2 ton/ha, dan kedelai 1,19 ton/ha. Jika dibandingkan dengan negara produsen pangan lain di dunia, khususnya beras, produktivitas padi di Lampung masih jauh dari harapan. Kedua, keberpihakan pemerintah daerah

Lampung terhadap pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan sering kalah oleh industri atau pertanian berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa untuk membiayai impor. Keempat, peningkatan luas areal penanaman-panen yang stagnan bahkan terus menurun, khususnya di lahan pertanian pangan produktif di Pulau Sumatera, Khususnya Lampung. Untuk kasus kedelai, luas panen sejak 2012 sampai 2013 terus menurun. Pada 2012 memiliki luas panen sebesar 621.541 hektare menjadi 464.427 hektare pada 2013. Alih fungsi lahan pertanian tak bisa dikendalikan. Sejak 2012 sampai 2013 saja, luas lahan pertanian menyusut dari 8.400.030 hektare menjadi 7.696.161 hektare.

(sumber:<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/23/menjamin-kebutuhan-pokok-rakyat-studi-kasus-di-lampung/>. Diakses pada tanggal 1 oktober 2014)

Undang-undang yang secara eksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan ketahanan pangan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai konsep ketahanan pangan, komponen, serta para pihak yang harus berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan yang mengatur tentang ketahanan pangan dengan cakupan ketersediaan pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Adapun sistem ketahanan pangan berdasarkan kebijakan

umum ketahanan pangan dan kebijakan perberasan (Inpres No. 1 Tahun 2008) yaitu meliputi :

1. Ketersediaan, diantaranya produksi dalam negeri, impor, cadangan.
2. Distribusi, dalam system ketahanan pangan distribusi yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengenai aksesibilitas baik fisik maupun ekonomi. Yakni bagaimana menciptakan kemudahan akses bagi masyarakat sehingga akan sangat menunjang dalam kegiatan perekonomian.
3. Konsumsi, dengan cakupan kualitas pangan (keseimbangan gizi, mutu, keamanan), serta diversifikasi pangan.

Melalui pelaksanaan Sistem di atas diharapkan akan mampu mencapai kemandirian pangan. Kemandirian pangan merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal (*RPJPN 2005-2025*). Berdasarkan pengertian kemandirian pangan tersebut, dapat diketahui bahwa kemandirian pangan merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Program percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan (P2KP) merupakan program nasional berbasis sumber daya lokal yang berjalan dan telah disosialisasikan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT). Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ini dilaksanakan berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor: 22 tahun 2009 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal, yang ditindaklanjuti oleh

Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.140/10/2009 tentang gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

(Sumber: <http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/P2KP.PDF>).

Program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Program ini juga dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi pangan beras dan kemudian meningkatkan konsumsi pangan non beras. Program P2KP ini bisa memberikan jalan dalam pemanfaatan membudidayakan tanaman lokal sebagai pengganti beras.

(Sumber:<http://www.radartanggamus.co.id/berita-utama/1029-p2kp-mulai-berjalan>)

Salah satu kegiatan dari program penganeekaragaman konsumsi pangan yaitu optimalisasi pekarangan. Hal yang dilakukan dalam program ini yaitu pengembangan pekarangan anggota, pengadaan kebun bibit, pengembangan kebun sekolah dan pengenalan pengembangan menu bergizi, beragam, seimbang dan aman (B2SA). Melalui program ini, dapat mewujudkan Desa yang mandiri pangan. Desa mandiri pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Kecamatan Pugung merupakan salah satu wilayah di kabupaten Tanggamus yang menerima Program percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dari kantor

Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus. Pekon Rantau Tijang merupakan salah satu Pekon yang terdapat di Kecamatan Pugung, dan terdaftar sebagai salah satu Pekon yang mendapatkan Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tersebut. Desa ini dipilih berdasarkan kriteria yang mengacu pada pedoman umum Program penganekaragaman konsumsi pangan.

Syarat yang harus dipenuhi calon penerima dan calon lokasi yaitu: 1) kelompok wanita yang beranggotakan minimal 30(tiga puluh) rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, 2) bukan kelompok penerima bantuan social lainnya di tahun berjalan, 3) memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi yang jelas dan diketahui Kepala Desa, 4) mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit (bukan menyewa lahan) dan memeliharanya untuk kepentingan anggota kelompok dan masyarakat lainnya, 5) setiap anggota wajib mengembangkan pemanfaatan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan (sayur, buah, umbi,) ataupun memelihara ternak dan ikan, 6) mampu mengelola keuangan kelompok dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan, 7) terdapat sekolah yang lokasinya berdekatan dengan kelompok wanita penerima manfaat P2KP, 8) sanggup bekerja sama dengan SD/MI/SMP/SMA yang berada di lokasi P2KP untuk mengembangkan Kebun Sekolah.

(Sumber: <http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/P2KP.PDF>).

Berdasarkan pendataan, penerima raskin terbanyak berada di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan jumlah mencapai 5.245 RTSM yang tersebar di

20 Pekon. Jumlah RTSM Pekon Rantau Tijang sendiri yakni mencapai 650 RTSM dan merupakan jumlah RTSM terbanyak pula.

(Sumber: <http://www.translampung.com/artikel-2240-2015-raskin-tanggamus-8288-ton.aspx>)

Melihat begitu besarnya jumlah RTSM di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung, maka Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan program yang sangat penting bagi Pekon tersebut. Karena seiring meningkatnya permintaan beras yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok masyarakat sekitar. Peningkatan penganekaragaman pangan melalui program ini akan mampu meningkatkan kemandirian terutama kebutuhan pangan. Kepala Seksi Distribusi dan Konsumsi menyatakan bahwa hingga saat ini, program P2KP dianggap belum berhasil mencapai tujuannya untuk menekan konsumsi beras dan menciptakan ketahanan pangan yang stabil.

Berdasarkan permasalahan mengenai pelaksanaan Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan mengingat akan pentingnya implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai langkah Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan serta sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan (Studi pada Kegiatan Kelompok Wanita Tani di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)” Sehingga kebijakan ketahanan pangan melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dapat berjalan secara optimal

dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan terwujudnya ketahanan pangan masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam mewujudkan ketahanan Pangan di Pekon Rantau Tijang Kec.Pugung?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Pekon Rantau Tijang Kec.Pugung?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk memperoleh analisa tentang implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kec. Pugung Kab. Tanggamus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Program Percepatan Penganekaragaman konsumsi Pangan di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan Ilmu Administrasi Negara dalam bidang pembangunan khususnya mengenai kebijakan ketahanan pangan.

2. Secara praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam bidang sistem ketahanan pangan. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan berguna dalam pengembangan ilmu pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Dalam suatu negara, kebijakan sangat penting karena kebijakan merupakan segala sesuatu langkah pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Menurut Eyestone dalam Winarno (2004:15) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Dye dalam Winarno (2004:15) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Akhirnya Friedrich dalam Wahab (2004:3) memberi pandangan mengenai kebijakan publik, Ia menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan

sasaran yang diinginkan. Pandangan lain dari Heglo dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Bertolak dari pengertian yang diberikan Heglo, Jones dalam Abidin (2012:6) merumuskan kebijakan sebagai suatu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk pencapaian suatu tujuan atau sasaran tertentu.

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Dalam menetapkan kebijakan, terdapat beberapa tahapan seperti yang dikemukakan oleh Dunn dalam Winarno (2004:28) sebagai berikut:

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Dalam tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative yang ada.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public telah meraih dampak yang diinginkan.

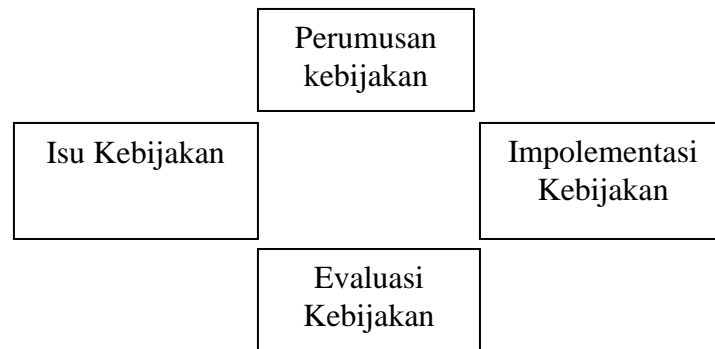


Gambar 2.1

Berbeda halnya dengan Islamy (1994:77) yang menguraikan enam langkah dalam perumusan kebijaksanaan Negara sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah kebijaksanaan Negara
- b. Penyusunan agenda pemerintah
- c. Perumusan usulan kebijaksanaan Negara
- d. Pengesahan kebijaksanaan Negara
- e. Pelaksanaan kebijaksanaan Negara
- f. Penilaian kebijaksanaan Negara

Selain itu, Nugroho (2009:157) menggambarkan proses kebijakan sebagai berikut:



Gambar 2.2

- a. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama. Isu diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
- b. Perumusan kebijakan. Isu kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan public dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Implementasi kebijakan. Setelah dirumuskan, kebijakan public ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Evaluasi kebijakan. Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

Dari beberapa macam tahapan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap perumusan kebijakan publik terdapat lima tahap yaitu perumusan masalah, perumusan kebijakan, menetapkan kebijakan, implementasi kebijakan, dan

evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis berada pada tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah kebijakan, karena jika pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan akan tetapi tidak diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata maka kebijakan itu akan sia-sia. Maka dari itu, penulis ingin melihat implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, karena dengan adanya implementasi kebijakan kita dapat mengetahui baik atau buruknya suatu kebijakan. Lester dan Stewart dalam Winarno, (2004:101-102) menyatakan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan VanHorn dalam Wahab (2006:65) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sementara itu, Sabatier dan Mazmanian (1979) dalam Wahab (2004:65) . menjelaskan makna implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus

perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi merupakan proses mewujudkan suatu keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disahkan agar dampak dari keputusan dapat terlihat.

2. Syarat- Syarat Pelaksanaan Kebijakan

Untuk mengetahui sejauhmana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang mempengaruhi atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan. Menurut Nakamura dalam Hamidjoyo (2004:19) merekomendasikan lima (5) kriteria keberhasilan implementasi program atau kebijakan yang dapat di ukur dari hasilnya, meliputi:

- a. Pencapaian tujuan kebijakan atau hasil akhir,
- b. Efisiensi
- c. Kepuasan kelompok sasaran
- d. Daya tangkap klien
- e. Sistem pemeliharaan

Pendapat lain dikemukakan Islamy (2008:98) yang menyebutkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu :

a. Isi kebijakan

Isi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperincinya tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Informasi kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

c. Dukungan kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan, karena disini terkait kepentingan pribadi dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan tentang efektifitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang histories, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.

d. Pembagian potensi kebijakan

Mencakup tingkat diferensiasi tugas dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang

disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang tidak kalah penting dalam upaya melaksanakan kebijakan untuk menghindari kegagalan-kegagalan dalam pencapaian tujuan.

3. Model- model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa model-model implementasi yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Berikut beberapa model proses implementasi kebijakan. Yang pertama dikemukakan oleh Grindle dalam Sutirin, (2006:27) menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (Konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. Variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

- a. Kepentingan yang mempengaruhi
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup tiga indikator yaitu:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sisi lain, Edward dalam Winarno,(2004:126), menyatakan terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Empat faktor tersebut yakni:

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber
- c. Kecenderungan-kecenderungan
- d. Struktur birokrasi

Menurut Edwards dalam Winarno,(2004:150-153), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi.

Model implementasi lain yaitu dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:81) yang berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan Negara ialah mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses

implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
- c. Pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Pandangan lain berbeda mengenai model implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan menurut Van Meter dan Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana
- e. kondisi ekonomi-sosial-politik,
- f. kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Tanpa adanya implementasi, maka kebijakan hanya akan menjadi mimpi yang tidak terwujud. Untuk mengetahui proses implementasi yang telah dilaksanakan, tentu kita membutuhkan model yang cocok. Van

Meter dan Van Horn dalam Winarno (2004:110) memandang bahwa kita dapat melihat melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dengan menjelaskan hubungan-hubungan antar variable. Maka dari itu, peneliti ingin melihat bagaimana proses implementasi dalam program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui variable yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu meliputi ukuran-ukuran dasar dan tujuan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, serta kondisi-kondisi ekonomi, social dan politik.

4. Model implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2004:110), mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Model ini seperti diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2004:110), identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator

pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menciptakan ketahanan pangan untuk masyarakat melalui program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

b. Sumber-sumber kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2004:112).

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Dalam Winarno, (2004:112), implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian

yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2004: 116), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Dalam Winarno, (2004:116), Van Meter dan Van Horn menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;

- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislative dan eksekutif);
- 4) Vitalitas suatu organisasi
- 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik Negara dan kebijakan public secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2004:117) faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2004:117) mengusulkan agar kita memberi pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi itu dilaksanakan:

- 1) Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi berhasil?
- 2) Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
- 3) Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
- 4) Apakah elit-elit mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
- 5) Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
- 6) Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

Dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat membantu peneliti untuk melihat bagaimana dampak ekonomi, sosial, dan politik dari pelaksanaan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

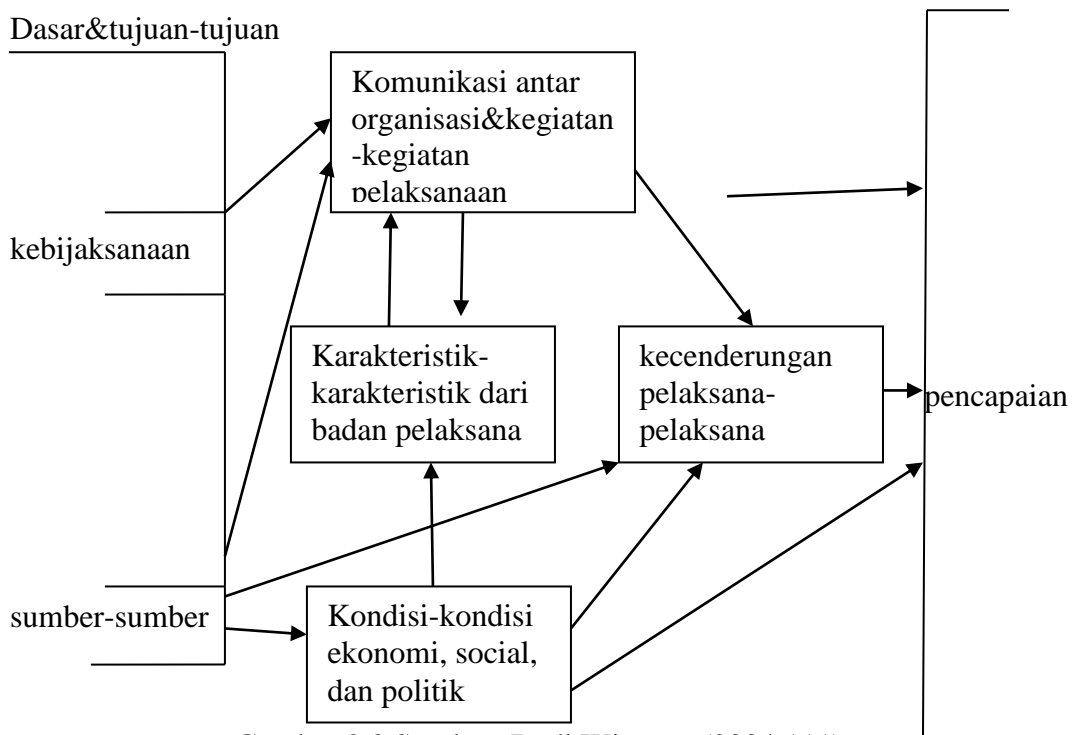
f. Kecenderungan pelaksana (implementators)

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2004:117) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerima, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

g. Kaitan antara komponen-komponen model

Implementasi merupakan proses dinamis. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Dengan demikian, studi implementasi yang dilakukan secara longitudinal menjadi sangat penting di mana hubungan-hubungan diidentifikasi pada suatu waktu tidak harus diperpanjang secara kausal pada periode waktu lainnya. Cara ini menurut Van Meter dan Van horn dalam Winarno,(2004:119), akan mampu mendeskripsikan dan membenarkan secara singkat mengenai beberapa hubungan yang dihipotesiskan sebelumnya. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran-ukuran



Gambar 2.3 Sumber: Budi Winarno (2004:111)

C. Tinjauan Tentang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan masalah yang krusial bagi suatu Negara. FAO (1997) dalam Hanani (2008:22) mendefinisikan ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.

Oxfam(2001) Ketahanan Pangan adalah kondisi ketika: “setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dua kandungan makna tercantum di sini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim).

Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1) tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

2) Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.

3) Terpenuhiya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.

Terpenuhiya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan merupakan keadaan terpenuhiya penyediaan pangan rumah tangga dengan melibatkan lintas sektor demi tercukupinya pangan baik dalam hal jumlah, akses, serta keamanan.

Arifin (2001:50), menjelaskan beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu “ketersediaan pangan” dan “aksesibilitas masyarakat” terhadap bahan pangan tersebut. Jika salah unsur di atas tidak terpenuhi, maka suatu Negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional atau regional, tetapi akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Aspek distribusi bahan pangan sampai pelosok rumah tangga –pedesaan yang tentunya mencakup fungsi tempat, ruang, dan waktu juga tidak kalah penting dalam upaya memperkuat strategi ketahanan pangan.

Ketersediaan dan kecukupan pangan juga mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standard kebutuhan kalori dan energi

untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Penyediaan pangan tentunya dapat ditempuh melalui: 1) produksi sendiri, dengan cara memanfaatkan dan alokasi sumber daya alam, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, serta aplikasi dan penguasaan teknologi yang optimal; 2) impor dari Negara lain, dengan menjaga perolehan devisa yang memadai dari sektor dan subsector perekonomian untuk menjaga neraca keseimbangan perdagangan luar negeri.

Dalam ketahanan pangan atau aksesibilitas setiap individu terhadap bahan pangan dapat dijaga dan ditingkatkan melalui pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang juga dapat disempurnakan melalui kebijakan tata niaga, atau distribusi bahan pangan dari sentra produksi sampai ke tangan konsumen. Akses individu ini dapat juga ditopang oleh .intervensi kebijakan harga yang memadai, menguntungkan dan memuaskan berbagai pihak yang terlibat. Intervensi pemerintah dalam hal distribusi pangan pokok masih nampak relevan, terutama untuk melindungi produsen terhadap anjloknya harga produk pada musim panen, dan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga kebutuhan pokok pada musim tanam atau musim paceklik.

Organisasi Pangan dan Pertanian sedunia (FAO) menetapkan beberapa kriteria tentang ancaman ketahanan pangan suatu Negara. Kriteria itu antara lain:1) tingginya proporsi penduduk yang kekurangan pangan; 2) tingginya proporsi kekurangan energi / protein dari rata-rata kebutuhan energi/ protein yang

diisyaratkan (*food gap*); 3) besarnya indeks gini dari *food gap* konsumsi energi/protein; dan; 4) besarnya koefisien variasi konsumsi /energi.

Menurut Sen dalam Kusumahningtyas (2012:24), ketahanan pangan memiliki peran ganda yaitu sebagai salah satu sarana utama pembangunan dan sebagai salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi. Peran utama merupakan fungsi ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk terjaminnya akses pangan bagi semua penduduk negara dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk keberlangsungan hidup yang sehat dan produktif. Peran kedua, merupakan implikasi dari fungsi ketahanan pangan sebagai syarat keharusan dalam pembangunan sumber daya manusia yang kreatif dan produktif yang merupakan determinan utama dari inovasi ilmu pengetahuan, teknologi dan tenaga kerja produktif. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan juga memiliki fungsi sebagai salah satu determinan lingkungan perekonomian yang stabil dan kondusif bagi pembangunan. Ketidaktahanan pangan dan kelaparan justru kerap terjadi karena ketiadaan akses atas pangan bukan masalah produksi dan ketersediaan semata. Kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya).

Menurut Kasryo dalam Kusumahningtyas,(2012:27) yang sangat sensitif mempengaruhi ketahanan dan keamanan pangan di tingkat rumah tangga adalah daya beli atau keterjangkauan komoditi pangan. Golongan masyarakat yang sangat rentan terhadap perubahan ini adalah angkatan kerja yang bekerja pada

sektor informal dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya jangkauan terhadap penguasaan lahan pertanian dan aset produktif lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang mendasar dalam ketahanan pangan adalah keterjangkauan pangan oleh rumah tangga dan masalah keberlanjutan dari penyediaan pangan. Keterjangkauan pangan oleh keluarga ditentukan oleh tingkat pendapatan dan harga pangan. Keberlanjutan ditentukan oleh kemampuan dan stabilitas produksi pangan dalam negeri dan kemampuan pembiayaan untuk mengimpor serta keadaan penyediaan pangan di pasar internasional. Ketahanan pangan dapat terwujud apabila semua aspek yang terkait dengan hal-hal yang mendukung ketahanan pangan bekerja sesuai dengan system dan fungsinya.

1. Sub Sistem Ketahanan Pangan

Dalam Hanani (2008:23) menjelaskan Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Secara rinci penjelasan mengenai sub sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sub sistem ketersediaan (*food availability*): yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.
- b. Akses pangan (*food access*): yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.
- c. Penyerapan pangan (*food utilization*) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita. (Riely et.al , 1999).
- d. Stabilitas (*stability*) merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis (*chronic food insecurity*) dan kerawanan pangan sementara (*transitory food insecurity*). Kerawanan pangan

kronis adalah ketidak mampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial. Maxwell and Frankenberger dalam Hanani (2008:27).

- e. Status gizi (*Nutritional status*) adalah outcome ketahanan pangan yang merupakan cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya status gizi ini diukur dengan angka harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

Secara umum (Baliwaty, 2004), ketahanan pangan mencakup 4 aspek, yaitu:

- a. Kecukupan (*sufficiency*),
- b. akses (*access*),
- c. keterjaminan (*security*), dan
- d. waktu (*time*)

Dengan adanya aspek tersebut maka ketahanan pangan dipandang menjadi suatu sistem, yang merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability dan stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*) dan pemanfaatan pangan.

Asumsi lain diungkapkan oleh Riely et.al dalam Kusumaningtyas (2012:16) yang mengungkapkan bahwa masalah ketahanan pangan berfokus pada tiga hal yaitu:

- a. Ketersediaan pangan (*Food Availability*)

Ketersediaan pangan dicapai pada saat kecukupan kuantitas pangan tersedia bagi seluruh individu secara konsisten di seluruh wilayah negeri

b. Keterjangkauan pangan (*Food Access*)

Hal ini dipastikan terpenuhi secara efektif ketika rumah tangga atau seluruh individunya mempunyai sumber daya yang cukup yang memperoleh pangan sewajarnya dan bergizi.

c. Pemanfaatan pangan (*Food Utilization*)

Pemanfaatan ini bergantung pada ukuran pemahaman pengetahuan dari rumah tangga dalam hal penyimpanan pangan dan teknik pengolahan serta prinsip dasar kandungan gizi pangan dan perawatan anak yang tepat, serta pencegahan penyakit.

Dari beberapa subsistem ketahanan pangan yang di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan mencakup tiga hal, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

2. Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah salah satu program yang dilancarkan guna meningkatkan diversifikasi pangan, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Strategi yang diterapkan dalam pengembangan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan cara internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan. Proses dari internalisasi yakni melalui advokasi, kampanye, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam,

bergizi, seimbang dan aman kepada aparat pada berbagai tingkatan dan masyarakat serta pendidikan konsumsi pangan yang B2SA melalui jalur pendidikan formal dan non formal/ penyuluhan. (Pedum P2KP 2014).

Mekanisme program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diimplementasikan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari(KRPL). Optimalisasi ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga. Dengan demikian akan terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari optimalisasi pekarangan. Di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan.
- 2) Model pengembangan pangan pokok local (MP3L), yaitu mengembangkan pangan local sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan beras/ nasi “non beras” sumber karbohidrat yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, berbahan baku sumber pangan local, mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan non beras dan sumber pangan lain, serta memperbaiki mutu konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan

pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayur mayur dan buah.

- 3) Sosialisasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), kegiatan sosialisasi dan promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, kesadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan local sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan masalah-masalah yang ada dengan cara menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian. Dengan metode kualitatif, penelitian bertujuan untuk menjelaskan mengenai gejala yang ada dalam suatu fenomena atau masalah penelitian yaitu mengungkapkan masalah impementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Karena berdasarkan pendapat Bodgan dan Taylor (1975:5) Dalam Moleong (2009:4) bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan terlebih dahulu. Fokus

penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah ditetapkan.

Jadi fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu:
 - a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
 - b. Sumber-sumber kebijakan
 - c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana
 - d. Karakteristik badan-badan pelaksana
 - e. kondisi ekonomi-sosial-politik,
 - f. kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.
2. Kendala-kendala dalam implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja yaitu Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung. Karena Pekon Rantau Tijang merupakan induk Kecamatan, sekaligus sebagai pekon dengan jumlah permintaan beras 5.245 RTSM terbanyak dibandingkan dengan Pekon lain.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan hasil pemikiran, tanggapan atau pendapat seseorang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Data penelitian terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu berupa kata-kata, tindakan informan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti dengan informan dan observasi. Informan merupakan salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian. Adapun orang-orang yang dijadikan informan yaitu orang yang terlibat dalam implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yakni:

- a. Bapak Dian Hidayat, SP.,MM, Kepala seksi Konsumsi dan Keamanan pangan Kantor Ketahanan Pangan selaku Koordinator program .
- b. Bapak Suryo Ndadari, SP.,MM, Kepala Staf dan Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan
- c. Ibu Nur'aini, SP. Selaku Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung.
- d. Bapak Hasman selaku Kepala Pekon Rantau Tijang
- e. Bapak Drs. Hardasyah, MM., selaku Camat Pugung
- f. Ibu Susneli selaku Ketua kelompok tani dan anggota sebagai penerima dan pelaksana program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Pekon Rantau Tijing Kec.Pugung Kab.Tanggamus. Berikut merupakan daftar dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian:

Tabel 3.1. Daftar Dokumen-Dokumen yang ada kaitan dengan penelitian

No	Dokumen-Dokumen	Substansi
1	Profil Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung	Gambaran umum mengenai Pekon
2	Pedoman umum program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	keterangan yang mengatur tentang bagaimana petunjuk pelaksanaan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*indepht interview*)

Wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung

terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati implementasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan informasi berupa surat-surat, peraturan daerah, pedoman umum, dan lain sebagainya. Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu data-data yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

F. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan cara menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan tiga komponen yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction data*).

Data yang diperoleh di lapangan dipilih yang penting dan kemudian disederhanakan. Dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya. Hal ini dilakukan terus menerus selama proses penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan adanya

penyajian data akan memudahkan peneliti dalam merencanakan langkah selanjutnya.

Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*concluting drawing*).

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, hubungan, hal-hal yang sering muncul, yang disajikan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi serta dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas data yang diperoleh. Dalam Susilo (Moleong, 2004:324), ada 4 kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti

pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan.

untuk memeriksa derajat kepercayaan (*credibility*) ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data. Triangulasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan memeriksa temuan di lapangan dengan membandingkannya berbagai sumber, metode, dan teori yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Maka dari itu, peneliti menyediakan data deskriptif secukupnya sehingga memudahkan pembaca untuk memahami.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam

penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus dari tahun 2004 sampai dengan 2008 Program Peningkatan Ketahanan Pangan di bawah tanggung jawab Bidang Penyuluh dan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanggamus. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Perda Nomor 03 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus , dan Perda Nomor 07 Tahun 2008 Kabupaten Tanggamus tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Tanggamus, wewenang Bidang Ketahanan Pangan ditangani oleh Kantor Ketahanan Pangan. Maka pada bulan Mei 2008 terbentuklah Lembaga Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten tanggamus dengan susunan struktur organisasi Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha, dan 2 seksi yaitu Seksi Ketersediaan Pangan dan Seksi Konsumsi dan Distribusi Untuk menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus lebih optimal, maka kelembagaan yang sebelumnya terdiri dari 2 (dua) seksi ditambah 1 (satu) seksi lagi, sehingga menjadi 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Seksi Distribusi dan Harga Pangan

dan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dengan landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

B. Visi Dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kab.Tanggamus

Visi

Visi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus:

Terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Tanggamus yang Mandiri dan berkelanjutan untuk mendukung Ketahanan Pangan yang kuat dalam Rangka menuju masyarakat yang tangguh dan sejahtera

Misi

Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus :

- a) Mendorong penyediaan dan pemanfaatan pangan dalam jumlah mutu yang cukup untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya
- b) Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat keluarga, lokal dan daerah sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal
- c) Menciptakan koordinasi yang harmonis dengan lembaga terkait dalam bidang ketersediaan, pengadaan dan distribusi kewaspadaan dan keamanan serta keanekaragaman pangan
- d) Mendorong pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan
- e) Meningkatkan kualitas pengkajian, pemantauan dan perumusan kebijakan yang menyangkut aspek ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan

harga pangan strategis, kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya penganekaragaman konsumsi pangan

- f) Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia baik aparatur maupun masyarakat dibidang ketahanan pangan

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus

Tugas Kantor Ketahanan Pangan Sesuai Bab IX Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 10 Tahun 2011 , Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus adalah “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan”

Dalam Melaksanakan Tugas, Kantor ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Ketahanan Pangan
2. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Ketahanan Pangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dibidang Ketahanan Pangan

D. Tujuan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus

1. Meningkatkan Kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus dan meminimalkan pasokan pangan dari luar daerah
2. Meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Tanggamus dengan Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan

3. Meningkatkan jangkauan jaringan distribusi, akses pangan masyarakat, dan pemasaran pangan keseluruhan kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
4. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mengenali mengantisipasi dan menangani secara dini serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.
5. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Tanggamus
6. Meningkatkan Kualitas Konsumsi pangan Masyarakat
7. Meningkatkan sinergisme aparat-masyarakat dan fasilitas aktif masyarakat
8. Mewujudkan keamanan pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi dalam seluruh kegiatan rantai pangan
9. Tertanganinya secara cepat penduduk yang mengalami rawan pangan transien didaerah karena bencana alam dan bencana sosial.
10. Memiliki Cadangan Pangan Pemerintah 100 Ton beras pertahun
11. Meningkatkan mutu pangan dan gizi menuju standar mutu pangan sesuai dengan SNI

E. Sejarah Pekon Rantau Tijang

Pekon Rantau Tijang merupakan salah satu pekon dari 27 Pekon yang ada di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Pada mulanya Desa Rantau Tijang di buka pada Tahun 1579 yang dipimpin oleh Inton Laliwa, kemudian yang kedua dipimpin Pangeran Buai Khawan dari kelompok selagai.

Arti nama dari Rantau Tijang sendiri adalah Rantau artinya Air yang Panjang, sedangkan Tijang artinya panjang dan dangkal. Jadi Rantau Tijang memiliki pngerian yaitu air yang panjang dan dangkal.

Rantau Tijang sejak zaman Hindia Belanda menjadi ibu kota Marga Pugung dari tahun 1952 sampai sekarang ibu kota kecamatan pugung adalah Pekon Rantau Tijang. Sebagian besar penduduk asli Lampung Pubian, dan sebagian lagi berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang hidup damai rukun dan bersatu.

F. Kondisi Umum Pekon

a. Geografis

1) Letak dan Luas wilayah

Pekon Rantau Tijang mempunyai luas wilayah seluas 2330 hektar, yang terdiri dari dataran rendah, pegunungan dan perbukitan. Dengan ketinggian ± 110 m dari permukaan laut dengan curah hujan 2000-3000mm/ tahun. Pekon Rantau Tijang merupakan salah satu dari 27 Pekon di wilayah kecamatan pugung, yang terletak 0 km ke arah kota kecamatan pugung.

Desa Rantau Tijang terletak di ibukota kecamatan pugung secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kali sekampung
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju dan Sumanda
- c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Tiuh Memon, Way jaha, sinar agung dan pungkut.
- d) Sebelah timur berbatasan desa lugusari, suka wangi, puji harjo kec. Pagelaran dan desa suka jadi, Tanjung kemala kec.pugung

2) Iklim

Iklim pekon Rantau tijang sebagaimana pekon-pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di pekon Rantau Tijang kecamatan pugung.

b. Keadaan sosial ekonomi penduduk

1) Jumlah penduduk

Pekon Rantau Tijang mempunyai jumlah penduduk 3876 jiwa yang tersebar dalam 8 wilayah dusun dengan princian sebagai berikut:

Nama Dusun	Jumlah penduduk		
	Jumlah Jiwa	Laki-Laki	Perempuan
Rantau Tijang Timur	972 Jiwa	487	485
Rantau Tijang Barat	943 Jiwa	453	490
Cilancar	432 Jiwa	229	203
Ciparai	314 Jiwa	154	160
Kampung Sawah	261 Jiwa	120	141
Suka Mandi	366 Jiwa	175	191
Pengebosan	255 Jiwa	132	123

Campang Kiri	333 Jiwa	164	169
Jumlah	3876 Jiwa	1914	1962

2) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi yang dapat digambarkan pada pekon Rantau Tijang, dari segi kesuburan tanah, hasil/ produksi pertanian, hewan ternak peliharaan serta tingkat pekerjaan warga desa Rantau Tijang dan lainnya adalah sebagai berikut:

- ✓ Tingkat kesuburan tanah
 - Sangat subur : 494,5 Hektar
 - Subur : 1046,6 Hektar
 - Sedang : 786,5 Hektar
 - Tidak subur : 2,4 Hektar

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan mengenai Implementasi Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di pekon Rantau Tijang Kec. Pugung Kab. Tanggamus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program penganekaragaman konsumsi pangan sebagai berikut:
 - a. Tujuan dan sasaran kegiatan untuk tingkat Desa sudah memenuhi kriteria, namun untuk memenuhi semua indikator keberhasilan program membutuhkan waktu yang lama. Salah satunya yaitu pengembangan jumlah usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung- tepungan dan model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) sesuai karakteristik daerah yang belum terealisasi.
 - b. Sumber-sumber kebijakan yakni tidak ada dana insentif lebih untuk tenaga Penyuluh pendamping lapangan (PPL) dan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia.
 - c. Komunikasi terjalin kurang baik, yakni belum tercapainya seluruh aspek yang menjadi indikator program.

- d. Kurangnya intensitas pengawasan dari pemerintah terhadap kelompok wanita tani sehingga mengakibatkan anggota merasa tidak diawasi , jadi kurang ada perawatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL).
 - e. Secara ekonomi, sosial dan politik, Terjadinya peningkatan perekonomian anggota kelompok, adanya kerjasama dalam bentuk gotong royong dalam bermasyarakat serta untuk aspek politik tidak ada kepentingan lain yang menghambat kelancaran atau jalannya kegiatan, seluruh pihak mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok wanita tani (KWT) .
2. Kendala-kendala dalam implementasi program penganeekaragaman konsumsi pangan yaitu:
- a. Kurangnya sarana dan prasarana kendaraan inventaris yang disediakan sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kondisi akses jalan raya atau infrastruktur yang buruk yang mengakibatkan sulit menuju lokasi program.
 - c. Jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai di lingkup Kantor Ketahanan Pangan.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran Peneliti sebagai acuan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan :

1. Pemerintah bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kab. Tanggamus agar lebih meningkatkan intensitas sosialisasi melalui penyuluhan akan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan, sosialisasi inovasi dan kreasi pengolahan bahan pangan dan promosi yang dilakukan dengan diadakan lomba cipta menu untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam mencoba melakukan berbagai kreasi dalam mengolah bahan pangan.
2. Pemerintah perlu mengalokasikan dana lebih untuk insentif tenaga Penyuluh dan diperlukan penambahan sumberdaya manusia yang bisa dilakukan dengan cara merekrut tenaga kerja baru dilingkup kantor ketahanan pangan.
3. Pemerintah harus lebih meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kegiatan pada program penganekaragaman konsumsi pangan yang dapat dilakukan dengan cara membuat jadwal rutin kunjungan ke lokasi program dan memberikan penyuluhan dan pelatihan terkait kegiatan program.
4. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana. Dalam hal ini memberikan kendaraan inventaris kepada petugas Penyuluh dengan mengajukan penambahan kendaraan inventaris kepada dinas terkait.
5. Masyarakat khususnya kelompok wanita tani sebaiknya bekerjasama antar anggota kelompok dalam menjaga dan merawat kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dengan cara sering diadakan pertemuan untuk membahas perkembangan dan kelanjutan program.

6. Perlu adanya perbaikan akses jalan menuju lokasi, hal ini dapat dilakukan dengan cara swadaya masyarakat atau mengajukan pada desa agar mendapat alokasi melalui dana desa untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi kegiatan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal.2012.Kebijakan Publik.Jakarta:Salemba Humanika
- Arifin, Bustanul.2001.Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia.Jakarta:Erlangga
- Baliwati, Y. F.2004.Pengantar Pangan dan Gizi.Jakarta:Swadaya
- Islamy, M Irfan.1994.Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara.Jakarta:
Bumi Aksara
- Kusumahningtyas, Nuniek.2012.Pengaruh Implementasi Program Desa Mandiri
Pangan
Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Purwakarta.
Tesis.Unpajj.Bandung
- Moleong, Lexy J.2009.Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:PT Remaja
Rosda Karya.
- Nugroho, Riant.2009.Public Policy.Jakarta: Elex Media komputindo
- Susilo.Bambang.Peran.2008.Civil Society Dalam Implementasi Kebijakan
Publik.Bandar Lampung:Skripsi.Universitas Lampung
- Sutirin.2006.Implementasi Kebijakan Pendataan Rumah Tangga Miskin dan
Distribusi KKB Oleh Badan Pusat Statistik (Studi Kasus di Kecamatan
Suruh Kabupaten Semarang).Tesis.Undip.semarang
- Wahab, Solichin Abdul.2004.Analisis Kebijakan Publik.Jakarta:PT Bumi Kasara
- Wahab, Solichin Abdul.1990.Analisis Kebijaksanaan Negara.Jakarta:PT Bumi
Aksara
- Winarno, Budi.2004.Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta:Media
Pressindo.

Sumber lain:

Hanani, Nuhfil AR. 2008. Pengertian Ketahanan Pangan. Melalui :
<http://lecture.brawijaya.ac.id/nuhfil/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf> diakses tanggal 17 Mei 2014

Inpres No. 1 Tahun 2008 Tentang kebijakan umum ketahanan pangan dan kebijakan perberasan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002

<http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/P2KP.PDF>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/23/menjamin-kebutuhan-pokok-rakyat-studi-kasus-di-lampung/>. Diakses pada tanggal 1 oktober 2014

<http://m.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/09/25/mtnije-indonesia-masuk-krisis-pangan> diakses pada tanggal 23 januari 2014

<http://www.radartanggamus.co.id/berita-utama/1029-p2kp-mulai-berjalan>

<http://mutosagala.wordpress.com/2012/04/04/ketahanan-pangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 23 januari 2014

<http://bkp.pertanian.go.id/proksi-6-demapan.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2014

.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal.2012.Kebijakan Publik.Jakarta:Salemba Humanika
- Arifin, Bustanul.2001.Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia.Jakarta:Erlangga
- Baliwati, Y. F.2004.Pengantar Pangan dan Gizi.Jakarta:Swadaya
- Islamy, M Irfan.1994.Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara.Jakarta:
Bumi Aksara
- Kusumahningtyas, Nuniek.2012.Pengaruh Implementasi Program Desa Mandiri
Pangan
Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Desa di Kabupaten Purwakarta.
Tesis.Unpajj.Bandung
- Moleong, Lexy J.2009.Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:PT Remaja
Rosda Karya.
- Nugroho, Riant.2009.Public Policy.Jakarta: Elex Media komputindo
- Susilo.Bambang.Peran.2008.Civil Society Dalam Implementasi Kebijakan
Publik.Bandar Lampung:Skripsi.Universitas Lampung
- Sutirin.2006.Implementasi Kebijakan Pendataan Rumah Tangga Miskin dan
Distribusi KKB Oleh Badan Pusat Statistik (Studi Kasus di Kecamatan
Suruh Kabupaten Semarang).Tesis.Undip.semarang
- Wahab, Solichin Abdul.2004.Analisis Kebijakan Publik.Jakarta:PT Bumi Kasara
- Wahab, Solichin Abdul.1990.Analisis Kebijaksanaan Negara.Jakarta:PT Bumi
Aksara
- Winarno, Budi.2004.Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta:Media
Pressindo.

Sumber lain:

Hanani, Nuhfil AR. 2008. Pengertian Ketahanan Pangan. Melalui : <http://lecture.brawijaya.ac.id/nuhfil/files/2009/03/2-pengertian-ketahanan-pangan-2.pdf> diakses tanggal 17 Mei 2014

Inpres No. 1 Tahun 2008 Tentang kebijakan umum ketahanan pangan dan kebijakan perberasan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002

<http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/P2KP.PDF>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/09/23/menjamin-kebutuhan-pokok-rakyat-studi-kasus-di-lampung/>. Diakses pada tanggal 1 oktober 2014

<http://m.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/09/25/mtnije-indonesia-masuk-krisis-pangan> diakses pada tanggal 23 januari 2014

<http://www.radartanggamus.co.id/berita-utama/1029-p2kp-mulai-berjalan>

<http://mutosagala.wordpress.com/2012/04/04/ketahanan-pangan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 23 januari 2014

<http://bkp.pertanian.go.id/proksi-6-demapan.html> diakses pada tanggal 2 Mei 2014

.